



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : *007* /HK.01.01/K.KS/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 08 Agustus 2022

KETUA,



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE., M.AP

Politik Luar Negeri Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Kedua 2024 kepada penanggung jawab

yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
yang telah diadukan oleh seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan
kegiatan yang telah diadukan sebagai pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan
dalam proses pemenuhan hak konstitusional seluruh kebulatan

Ditandatangani di Batulicin
Pada tanggal 08 Agustus 2022



H. KAHAR MUBIN, S.E., M.A.P.

Lampiran Keputusan

Nomor : 007 /HK.01.01/K.KS-09/08/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN TANAH BUMBU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	H. Kamiluddin Malewa, SE., M.AP	Koordinator Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Pengarah
2.	Muh. Sakra Efendi, S. Sos	Koordinator Pengawasan, Humas dan Hubal	Pengarah
II Penanggung Jawab			
3.	Ratna Kustiah, SE., S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab dan Wakil Sekretaris Penanggung Jawab			
4.	Ismaul Khusna, S.Pd. SD	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
	MHD. Fauzan Akmal Zaldhy, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Fahrudin, S.I.P	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Ketua
V Sekretaris			
7.	Andi Nurhaerurrijal Amin, SH	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VI Anggota			
8.	M. Zaini Lutfi, SH	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Rizwan Pratama	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Indro Kusnindro, SE	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
11.	I Gede Widiyantara, SH	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
12.	Ahmad Yani, S.Kom	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
13.	Ridha R. Megafitri, S.Kom	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
14.	Norlena	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
15.	Rika Mandarasih	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota
16.	Rizka Ariyani	Staf Divisi Organisasi, SDM dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 08 Agustus 2022

